

PEMBANGUNAN SEBAGAI PEMERDEKAAN

Institusionalisasi nilai kemerdekaan dalam pembangunan Indonesia



AGUS PAKPAHAN

**Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi
Pertanian Indonesia (PERHEPI 2000-2003)**



**1000 GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
TANPA MERUSAK LINGKUNGAN**

PEMBANGUNAN SEBAGAI PEMERDEKAAN: Institusionalisasi nilai pemerdekaan dalam pembangunan Indonesia¹

Agus Pakpahan

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI 2000-2003)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan ber- dasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMBUKAAN UUD-45

I. PENDAHULUAN

Kata pembangunan yang diambil dari bahasa Inggris *development* merupakan kata yang mengandung makna sangat penting dalam konteks politik-ekonomi. Dalam ruang lingkup tersebut pembangunan dapat diartikan sebagai pilihan politik Negara. Pilihan politik tersebut merupakan pilihan yang syah walaupun bisa saja bersifat *Non-Pareto*, yaitu Negara syah atas kebijakannya walaupun kebijakan tersebut merugikan bagi sekelompok masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, bahkan bisa saja termasuk kelompok masyarakat yang belum dilahirkan. Di sini tampak kata pembangunan dan kebijakan menyatu dalam satu nafas. Implementasi konkritnya dapat dibaca dalam bentuk peraturan-perundangan seperti undang-undang dan turunannya. Karena itu, sangatlah penting melihat pembangunan itu dari sudut pandang institusionalisasi dari serangkaian nilai di balik peraturan perundangan yang dilahirkan. Pertanyaan penting yang menjadi bahan uji objektivitas dari peraturan perundangan (kebijakan) yang akan ditetapkan atau telah ditetapkan (untuk dievaluasi) adalah apakah peraturan perundangan tersebut, sesuai dengan ruh atau jiwa Pembukaan di atas? Nilai pertama yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan atau anti-

¹ Tulisan dipersiapkan untuk Yayasan Madani Berkelanjutan.

penjajahan. Dengan demikian, langkah pengujian dalam seleksi perencanaan pembuatan kebijakan atau dalam proses evaluasi dari suatu atau serangkaian kebijakan adalah apakah nilai kemerdekaan sudah dijadikan dasar utama dalam penyusunan peraturan perundangan atau kebijakan tersebut,

Siapa mendapat apa berapa banyak kapan dan dimana setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun merupakan pertanyaan penting untuk menjadi bahan evaluasi dari suatu proses pembangunan yang telah dijalankan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa *“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”* (cetak miring dan garis bawah dari penulis). Jadi, siapa mendapat apa berapa banyak subyeknya adalah rakyat Indonesia. Di sinilah letak pentingnya falsafah pembangunan sebagai kemerdekaan.

Prediksi-prediksi apa yang akan dicapai pada 2050, misalnya, sebagaimana yang banyak dilakukan selama ini, juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan melihatnya dari perspektif kemerdekaan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan mengkaji pengalaman empiris kondisi Indonesia setelah merdeka selama 75 tahun dibandingkan dengan pengalaman negara lain seperti Korea Selatan atau Malaysia, atau bahkan dibandingkan dengan Jepang, RRT atau Amerika Serikat, juga akan memberikan input penting dalam mencari upaya meraih masa depan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945 di atas.

Tulisan ini akan mencoba menggunakan pendekatan pemikiran bahwa pembangunan itu sebagai proses kemerdekaan. Nilai kemerdekaan inilah yang perlu menjadi ruh atau spirit dalam kebijakan-kebijakan pembangunan baik itu dalam kebijakan fiskal, moneter maupun dalam kebijakan sektoral dan regional. Kata kemerdekaan adalah kata yang menggambarkan makna anti-penjajahan. Atau secara singkat kemerdekaan sama dengan anti-penjajahan. Ruh dan jiwa anti-penjajahan inilah asal-muasal berdirinya Indonesia dan cita-cita Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya secara global. Jadi, konsep pembangunan bukanlah merupakan konsep fisik-materi, melainkan konsep spirit dengan spirit yang paling dalam adalah menghapuskan segala bentuk penjajahan dengan ukuran berdirinya Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Agar kita memiliki bayang-bayang kemerdekaan yang secara nyata merupakan kontradiksi dari penjajahan, tulisan ini akan mengawali dengan menyajikan gambaran umum Indonesia pada masa Hindia Belanda.

II. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL HINDIA BELANDA vs. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL HASIL PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERTAMA

Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan apakah telah terjadi perubahan besar sejak Indonesia merdeka dibandingkan dengan Indonesia saat masih sebagai Hindia Belanda; atau apakah pola ekonomi Indonesia setelah Indonesia merdeka masih sama atau serupa saja dengan pola ekonomi Indonesia pada masa penjajahan? Pengetahuan ini sangat penting untuk dapat memahami apakah nilai-nilai kemerdekaan dari segala bentuk

penjajahan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut sudah menjadi ruh, jiwa dan darah-daging pembangunan nasional. Ukuran dari kemerdekaan ini adalah terwujudnya rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, yang sekaligus pula berpartisipasi secara bebas dan aktif dalam kancah pergaulan internasional.

Neraca Pembayaran Internasional (**Balance of Payments, BOP**) dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting tentang posisi Indonesia dalam kancah perekonomian global. Pada era penjajahan tentu strategi yang dijalankan oleh penjajah adalah mengeksploitasi negara-negara yang dijajahnya, seperti Indonesia pada waktu itu. Tulisan ini menggunakan data yang telah dipublikasikan Kano (2008). Data ini sangat penting mengingat mampu menggambarkan kondisi Indonesia dalam periode serial waktu yang cukup panjang yaitu 1870-1939 (69 tahun).

Tahun 1870 merupakan tahun yang sangat penting untuk mengamati perubahan global di Asia setelah dampak kehadiran Portugis² di Malaka pada tahun 1511. Tahun 1870 adalah tahun pertama gelombang manusia dan modal bangsa Eropa mengalir deras ke Asia, termasuk Indonesia. Hal itu terjadi mengingat pada tahun 1869 Terusan Suez dibuka sebagai jalan pelayaran baru yang memotong jarak sangat berarti. Rute pelayaran sebelumnya adalah bangsa Eropa harus mengelilingi benua Afrika³. Dengan dibukanya Terusan Suez pada 1869 ini, Pemerintah Belanda untuk menangkap momentum terbukanya iklim investasi di Hindia Belanda maka dengan segera menciptakan dan memberlakukan *Agrarischwet 1870*. Dengan dasar Undang-undang inilah investasi perusahaan besar dalam bidang perkebunan dengan menerapkan konsep Hak Guna Usaha (HGU) dimulai. Pola pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia yang sudah berusia 40 tahun yaitu Tanam Paksa yang dimulai pada 1830, pada tahun ini dihapus, kecuali untuk tebu dan kopi. Jadi, 1870 ini merupakan tahun dasar yang sangat penting bagi perjalanan sejarah perekonomian nasional serta keterkaitannya dengan aspek-aspek kehidupan bangsa, negara dan rakyat Indonesia hingga sekarang. Tahun 1870 sebagai tahun dimulainya beroperasi investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang perkebunan di Hindia Belanda.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai ekspor meningkat pesat. Selama 50 tahun yaitu dari 1870-79 ke 1920-29, nilai ekspor per 10 tahun meningkat dari 174 juta guilders menjadi 1550 juta guilders. Peningkatan nilai ekspor tersebut mencapai 890 persen. Penerimaan dari ekspor komoditas ini jauh melebihi impor barang masuk ke Hindia Belanda. Akibatnya, surplus perdagangan komoditas meningkat pesat yaitu dari 73 juta guilder pada periode 1870-79 menjadi 622 juta guilder pada periode 1920-29. Data menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi penurunan perdagangan komoditas setelah periode 1920-29 akibat depresi ekonomi dunia pada 1930-an, nilai perdagangan komoditas masih memberikan surplus bagi Hindia Belanda yang relatif besar. Komoditas utama yang diperdagangkan dalam pasar global pada waktu itu adalah komoditas perkebunan seperti kopi dan gula.

Tabel 1. Tren neraca pembayaran internasional Hindia Belanda (rata-rata tahunan unit: juta guilders)

²Menurut Ricklefs kehadiran Portugis di Malaka merupakan faktor pengubah permanen struktur ekonomi Asia Tenggara. Lihat Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300* (2nd ed.). London: MacMillan. ISBN 978-0-333-57689-2

³<https://www.history.com/topics/africa/suez-canal> diunduh 4 Mei 2020, jam 12:42

Periode	Neraca Berjalan									Neraca Modal		
	Perdagangan Barang			Neraca Lainnya			Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Ke-seim-bangan Nera-ca berjal-an	Modal Masuk	Modal keluar	Keseim-bangan neraca modal
	Expor	Impor	Neraca Komoditas	Penerimaan	Pengeluaran	Pembayaran keluar dividen /keuntungan						
1870-79	174	101	73	7	53	5	181	154	27	6	33	-27
1880-89	198	137	61	6	55	11	203	192	12	27	39	-12
1890-99	217	162	55	7	70	18	224	232	-8	42	33	8
1900-09	341	213	128	13	112	37	353	325	28	40	69	-28
1910-19	819	457	362	21	270	144	841	727	114	153	234	-81
1920-29	1550	927	622	40	591	253	1590	1518	72	235	306	-72
1930-39	679	451	227	65	275	68	744	726	18	138	155	-17

Sumber: Kano, H. 2008. Indonesian Exports, Peasant Agriculture and The World Economy, 1850-2000: Economic structures in a Southeast Asian State. NUS Press Singapore. Table 1-1. p. 16.

Satu jenis pengetahuan sangat penting yang dapat diambil dari Tabel 1 adalah pengetahuan tentang strategi keseimbangan neraca pembayaran internasional yang dilaksanakan Belanda untuk Hindia Belanda. Dalam Tabel 1 tampak terlihat bahwa neraca keseimbangan arus berjalan dengan neraca keseimbangan modal tampak persis dengan jumlah sama tetapi bertanda berbeda (positif/negatif) yang berlawanan. Misal, pada tahun 1870-79 nilai keseimbangan neraca berjalan mencapai 27 juta guilders (surplus) tetapi neraca keseimbangan modal pada tahun tersebut jumlahnya adalah -27 juta guilders (defisit). Tabel 1 memperlihatkan bahwa pola neraca keseimbangan ada dalam kesemimbangan penuh. Data ini menunjukkan bahwa Hindia Belanda surplus dalam bidang perdagangan barang/komoditas tetapi di pihak lain Hindia Belanda mengalami defisit dalam hal kapital. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada arus modal masuk dari luar negeri mendominasi investasi di dalam negeri. Karena itu tidak mengherankan pengeluaran yang besar terjadi pada pos dividen dan profit sebagai repatriasi pendapatan ke negara induknya. Kano mengistilahkan fenomena tersebut sebagai *capital cycle*. Dilihat dari sudut pandang lain dapat pula diartikan sebagai kebocoran kapital.

Tabel 2 menggambarkan fenomena perekonomian Indonesia pada kurun waktu kurun lebih dari 30 tahun pada era Pembangunan Nasional Jangka Panjang Pertama (PJP I) yaitu antara 1971 sampai dengan tahun 2000. Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal perdagangan barang Indonesia mengalami surplus walaupun bersifat fluktuatif. Adapun dalam hal perdagangan jasa Indonesia selalu mengalami defisit dengan nilai defisit yang meningkat. Nilai defisit dalam perdagangan jasa ini membuat nilai transaksi berjalan mengalami defisit juga seperti yang dialami pada tahun-tahun: 1971-73, 1975-78, dan 1982-97. Fenomena ini

membuat perekonomian Indonesia akan hampir selalu tergantung pada arus modal masuk dari luar negeri baik berupa hutang atau dengan nama lainnya untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional.

Konsekuensi dari strategi pembangunan di atas adalah arus uang keluar melalui jasa keuangan sangat besar. Bahkan nilainya lebih besar daripada nilai defisit jasa dalam bidang minyak dan gas dan *freights*. Dalam bidang jasa ini yang berada dalam posisi surplus hanyalah berada pada dua sektor yaitu devisa yang diperoleh tenaga kerja Indonesia (TKI) dan travel dan tourism⁴ (Tabel 3). Krisis ekonomi pada akhir tahun 1990an merupakan peristiwa krisis yang disebabkan oleh ketidak mampuan Indonesia membayar hutang setelah keharusan membayar hutang swasta meledak (Tabel2).

Bagaimana dengan perkembangan perekonomian Indonesia pasca 2000 sampai dengan sekarang? Jawaban akan pertanyaan ini dapat dilihat pada Gambar 1. Falianty (2017) menunjukkan bahwa arus transaksi berjalan mengalami defisit yang cukup dalam sejak periode 2010. Dalam gambar tampak seperti cermin terbalik (puncak defisit (-) dengan puncak modal (+) terjadi pada masa yang hampir bersamaan) antara defisit transaksi berjalan dengan capital (hutang) Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pola modal luar negeri yang masuk ke Indonesia itu secara proporsional diikuti oleh arus uang yang keluar dari Indonesia.

Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa pola perekonomian Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang belum banyak berubah. Volume nilai berkembang tapi dalam pola yang serupa. Fenomena ini mungkin dapat dinamakan sebagai pola pertumbuhan tanpa pembangunan. Pola pembangunan yang akan berlangsung dalam pola tersebut hanyalah pembangunan yang mengandalkan pendapatan dari sektor-sektor yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan dan sejenisnya. Sifat ekstraktif tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap sumberdaya alam yang akan terus dikuras dan terhadap lingkungan hidup seperti terjadinya kerusakan lingkungan di pelbagai tempat. *Vicious circle* ini terjadi karena modal bersumber dari luar negeri (dollar, yen dan lain-lain) tetapi pendapatan Indonesia berupa mata uang luar negeri (devisa) relatif terbatas akibat dari barang yang diekspor Indonesia merupakan barang yang bernilai rendah. Pembangunan yang sebenarnya adalah pembangunan sebagaimana yang telah berlaku di negara-negara maju yaitu pembangunan yang telah berhasil memerdekakan diri atas ketergantungan fisik/materi terhadap eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

⁴ Pengalaman membuka lahan untuk perkebuna kelapa sawit lebih dari 14 juta hektare atau sekitar 5 juta hektar lebih luas daripada negara Korea Selatan, tidak menjamin terwujudnya tingkat kemakmuran yang besar dan merata. Bahkan data 2018 menunjukkan bahwa nilai devisa hasil TKI dan Travel bisa lebih besar daripada nilai devisa hasil ekspor minyak sawit. Nilai devisa kelapa sawit pada 2018 mencapai US\$ 20.54 milyar, sedangkan nilai devisa TKI dan Turisme & Perjalanan masing-masing pada 2018 mencapai US\$ 11.22 milyar dan US\$ 16 miliar atau total mencapai US\$ 27.22 milyar; atau lebih tinggi US\$ 6.68 milyar dari nilai devisa yang didapat dari ekspor kelapa sawit.

Table 2. Neraca keseimbangan pembayaran internasional Indonesia 1971-2000 (satuan: juta US Dollar)

Year	Neraca Perdagangan (Current Account)					Neraca Modal (Capital Account)		
	Ekspor	Impor	Neraca Keseimbangan Perdagangan Barang	Neraca Keseimbangan Perdagangan jasa	Total	Sektor Swasta	Sektor Pemerintah	Total
1971	1307	1226	81	-511	-430	156	285	441
72	1757	1445	312	-784	-472	427	378	805
73	2957	2664	293	-1098	-805	498	556	1054
74	6755	4632	2123	-2097	26	382	596	978
75	6869	5468	1401	-2565	-1164	-1439	1778	339
76	8615	6815	1800	-2751	-951	237	1632	1869
77	10761	7473	3288	-3360	-72	-72	1397	1325
78	11020	8382	2638	-4072	-1434	333	1491	1824
79	15907	9946	5961	-5009	952	-611	1725	1114
1980	22609	13456	9195	-6399	2754	-630	2204	1574
81	23665	16542	7123	-6624	499	148	1963	2111
82	19747	17854	1893	-7351	-5458	1639	4117	5756
83	18689	17726	963	-7405	-6442	1826	4776	6602
84	20754	15047	5707	-7677	-1970	757	2865	3622
85	18527	12705	5822	-7772	-1950	68	1739	1807
86	14396	11938	2458	-6557	-4099	1291	3074	4365
87	17206	12532	4674	-6943	-2269	1548	2104	3652
88	19509	13831	5678	-7230	-1552	407	1965	2372
89	22974	16310	6664	-7974	-1280	314	2776	3090
1990	26807	21455	5352	-8592	-3240	4113	633	4746
91	29635	24834	4801	-9193	-4392	4410	1419	5829
92	33769	26774	7022	-10144	-3122	5359	1112	6471
93	36607	28376	8231	-10529	-2298	5219	743	5962
94	40223	32322	7901	-10861	-2960	3710	307	4008
95	47454	40921	6533	-13293	-6760	10252	336	10588

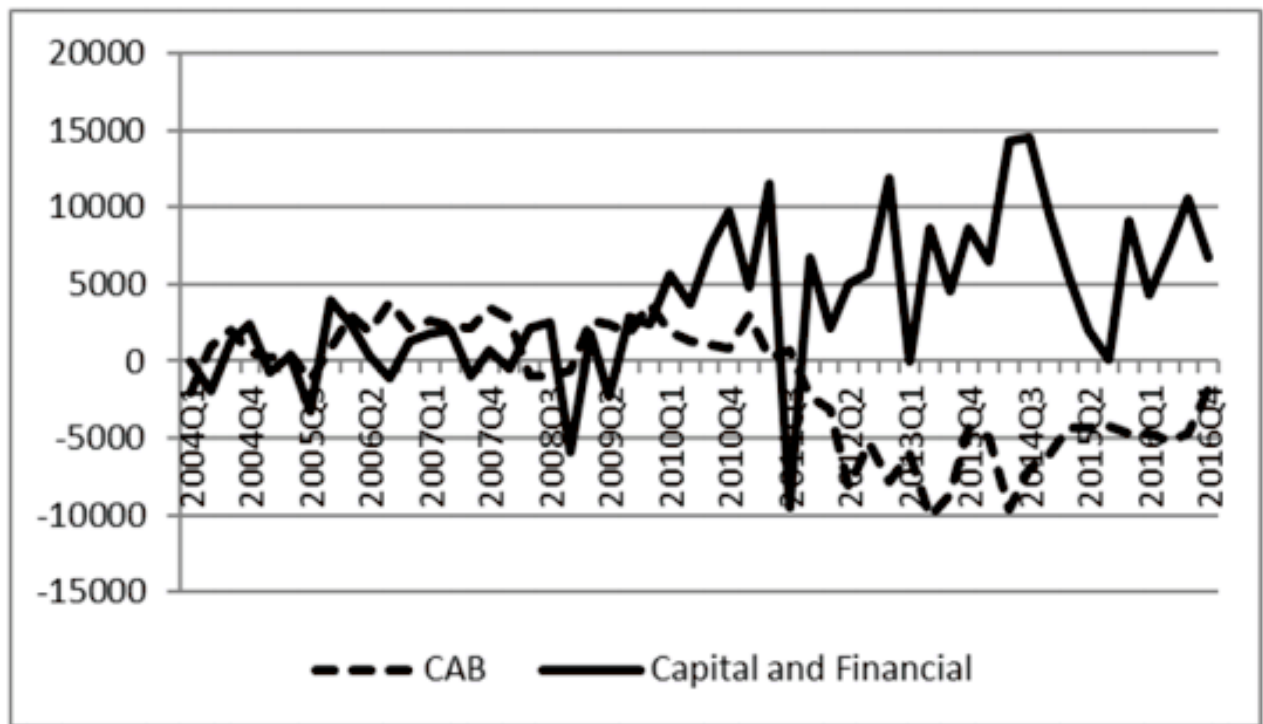
96	50188	44240	5948	-13749	-7801	11511	-522	10989
97	56297	46223	10074	-15075	-5001	-338	2880	2542
98	50371	31942	18429	-14332	4097	-13846	9971	-3875
99	51243	30599	20644	-14861	5783	-9923	5353	-4570
2000	65408	40367	25041	-17043	7998	-9992	3217	-6776

Sumber: Kano, H. 2008. Indonesian Exports, Peasant Agriculture and The World Economy, 1850-2000: Economic structures in a Southeast Asian State. NUS Press Singapore. Table 1-3. p. 20

Table 3. Trends of Balance of the Service Account (1990s, unit: million US dollars)

			Non Oil & Gas					
Year	Oil & Gas (A)	Travel	Investment Income	Remittance by Workers	Freights	Others	Subtotal (B)	Total (A+B)
1991	-3064	1546	-3478	130	-2385	-1942	-6129	-9193
1992	-3292	1737	-3394	229	-2601	-2823	-6852	-10144
1993	-3178	2060	-3869	346	-2730	-3158	-7351	-10529
1994	-2888	2675	-4693	449	-3189	-3215	-7973	-10861
1995	-3086	3057	-5828	651	-4118	-3969	-10207	-13293
1996	-3500	3787	-5947	796	-4430	-4455	-10249	-13749
1997	-4550	4237	-6332	725	-4606	-4549	-10525	-15075
1998	-2912	2154	-8189	959	-3050	-3294	-11420	-14332
1999	-3201	1999	-8995	1109	-2365	-3408	-11660	-14861
2000	-4550	1758	-8439	1164	-2709	-4274	-12500	-17050

Sumber: Kano, H. 2008. Indonesian Exports, Peasant Agriculture and The World Economy, 1850-2000: Economic structures in a Southeast Asian State. NUS Press Singapore. Table



Gambar 1. Keseimbangan neraca berjalan vs. keseimbangan neraca modal dan finansial

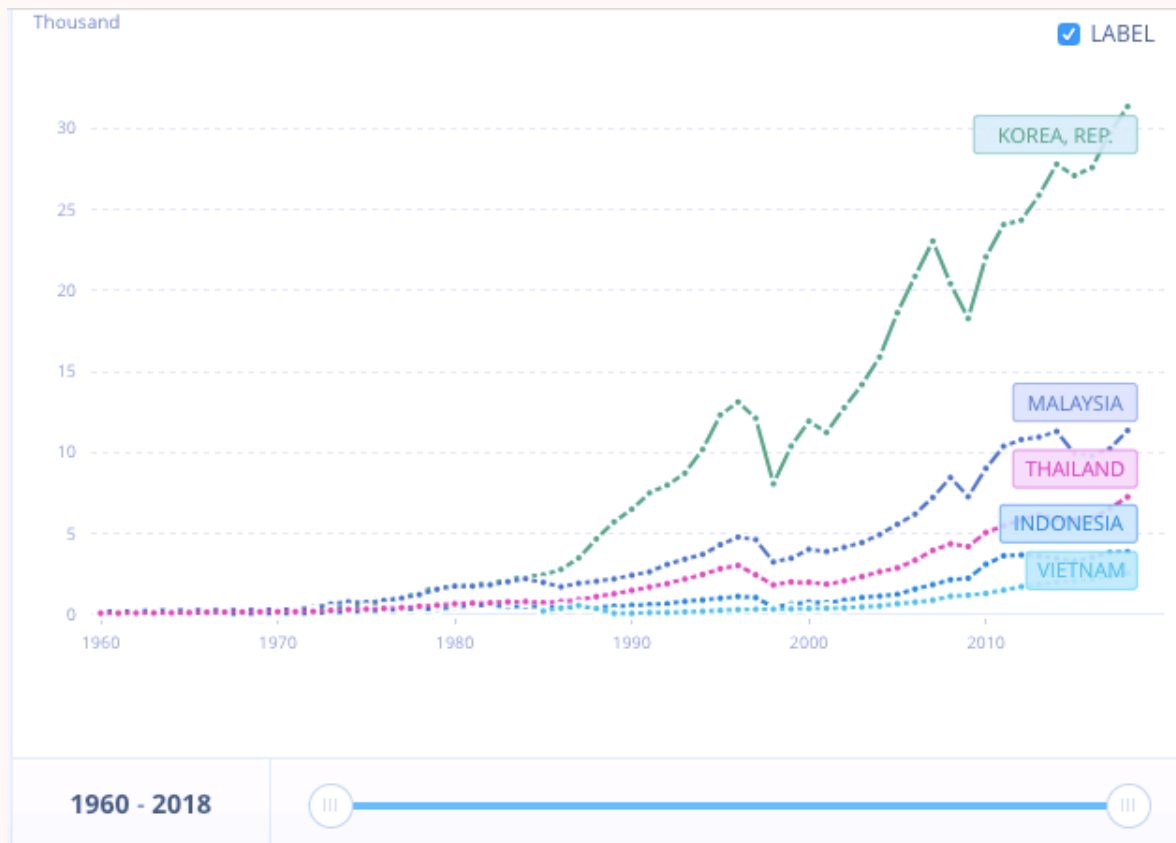
Sumber: Falianty, T. Balance of Payment Dynamic in Indonesia and the Structure of Economy. Economics and Finance in Indonesia Vol. 63 No. 1, June 2017 : 53–80

III. PEMBANGUNAN TANPA PEMERDEKAAN

Sebagaimana telah disinggung pengertian pembangunan tanpa pemerdekaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pembangunan yang mengandalkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif, yaitu mengurus sumberdaya alam seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan dan sejenisnya yang tanpa mendahulukan upaya membangun industri berbasis pada sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian, mudah sekali dapat dilihat bahwa nilai yang akan dicapai adalah nilai terendah mengingat produk yang diekspor masih berstatus sebagai bahan baku atau bahan mentah.

Selanjutnya, dikatakan sebagai pembangunan tanpa pemerdekaan juga dilandasi oleh pemikiran bahwa ide atau gagasan baru mengenai pemerdekaan sebagai esensi pembangunan tidak terlihat jelas. Bukti dari argumen ini adalah bahwa fenomena mengekspor bahan baku atau bahan mentah itu sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1 dan pada masa-masa sebelumnya. Makna pembangunan itu sendiri sangatlah mendalam bukan sekedar menyangkut aspek kebendaan atau materi saja. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa kemajuan negara-negara tersebut merupakan hasil atau output dari investasi pemikiran yang sangat mendalam dan kompleks sehingga lahirlah masyarakat industri yang menjalankan kehidupannya melalui proses

industrialisasi. Industrialisasi itu sendiri bukan sekedar diartikan sebagai mendirikan pabrik di mana-mana melainkan hal tersebut hanyalah sebagai akibat dari melembaganya alam pikiran industrial dalam sistem sosial-budaya secara keseluruhan. Itulah makna pembangunan sebagai pemerdekaan. Di sini konsep yang dibahas adalah konsep pembangunan pada tataran hakekat, filsafat atau bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi pembangunan.



Gambar 2. Perkembangan PDB Per Kapita Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Republik Korea Selatan

Sumber: Bank Dunia: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2018&locations=ID-KR-MY-TH-VN&start=1960> diunduh 4 Mei 2020:3:13pm

Dengan memandang pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, Gambar 2 mencoba menyajikan perjalanan empiris Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan selama 1960-2018 menurut ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Pada tahun 1960-1980an, menurut ukuran pendapatan per kapita dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Korea Selatan masih berada dalam satu kelompok yang relatif sama. Tetapi kemudian, Korea Selatan melaju dengan cepat dan di belakangnya berjalan Malaysia dan Thailand. Sedangkan Indonesia berada di belakang Thailand dan Malaysia. Melihat kecepatan Vietnam dalam pembangunan ekonominya, Vietnam diperkirakan sebentar lagi akan menyusul Indonesia. Apa yang menyebabkan Korea Selatan, Malaysia dan Thailand bergerak lebih cepat padahal kekayaan alam yang mereka miliki tidak sebanyak Indonesia?

Tabel 4 menyajikan data tentang indikator kemajuan ekonomi suatu negara yang diukur oleh *Economic Complexity Index* (ECI). Indikator ini menggambarkan bagaimana kompleksitas ekonomi suatu negara. Dalam pengertian sederhananya adalah bagaimana suatu proses pengolahan sumberdaya berkembang sehingga menghasilkan produk bernilai tinggi yang beraneka ragam jenisnya. Dengan berdasarkan atas Tabel 4 dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia itu masih sangat sederhana sehingga nilai ECI-nya pun masih bertanda negatif. *The Economic Complexity Index* (ECI) menunjukkan tingkat intensitas penerapan pengetahuan (*knowledge*) untuk produk-produk yang diekspor. Jadi, ekonomi Indonesia belum banyak bergerak maju apabila diukur oleh intensitas pengetahuan dalam kegiatan ekonomi Indonesia. ECI ini dapat menjelaskan mengapa kemajuan ekonomi Indonesia yang dicirikan oleh pendapatan per kapita tertinggal oleh Korea Selatan (ECI = 1.77613), Malaysia (ECI = 0.971372), dan Thailand (ECI = 0.711704).

Tabel 4. 20 negara dengan urutan peringkat menurut *Economic Complexity Index*

Negara	2017
Jepang	2.30938
Swiss	2.24386
Jerman	2.07537
Singapura	1.86534
Swedia	1.80773
Korea Selatan	1.77613
Amerika Serikat	1.75541
Finlandia	1.70679
Ceko	1.6431
Austria	1.62894
Inggris	1.53259
Slovenia	1.4319
Irlandia	1.40023
Perancis	1.38964
Hungaria	1.38444
Slovakia	1.3402
Israel	1.3146
Belanda	1.30343
Denmark	1.1577
Italia	1.11743

Malaysia	0.971372
Thailand	0.711704
Indonesia	-0.305644
Vietnam	-0.623084

Sumber: <https://oec.world/en/rankings/country/eci/> diunduh 4 Mei 2020:4:59pm

Malaysia dan Thailand merupakan negara Asean yang memiliki nilai ECI yang cukup berjarak agak jauh dari nilai indeks ECI Indonesia. Fenomena kemajuan pesat Malaysia ini sangat menarik mengingat secara kultural Malaysia dan Indonesia dapat dikatakan sebagai saudara serumpun. Walaupun Indonesia dan Malaysia ini secara kultural sebagai saudara serumpun tetapi dalam melihat dan membangun jalan untuk meraih masa depan relatif berbeda. Headrick⁵ menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara yang berada di wilayah tropika yang melakukan investasi di bidang pertanian cukup besar relatif terhadap negara-negara tropika lainnya. Bahkan pada periode 1981-85 Malaysia mengalokasikan anggaran riset pertanian sebesar US\$ 6.93 per kapita, jumlah ini lebih banyak daripada alokasi riset pertanian AS pada periode yang sama, yaitu US\$ 5.98/kapita. Sedangkan jumlah peneliti Malaysia hanya sedikit lebih rendah daripada peneliti di AS yaitu 51 peneliti per juta penduduk, sementara di AS 60 peneliti per juta penduduk. Bandingkan dengan investasi riset pertanian Indonesia yang nilainya hanya US\$ 0.86 per kapita dan tenaga peneliti Indonesia hanya 8 peneliti per juta penduduk⁶. Hal ini merupakan faktor penting yang membedakan Indonesia dan Malaysia sehingga pengalaman empiris dalam pertumbuhan pendapatan per kapita sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 memiliki garis yang berbeda dan nilai ECI yang berbeda pula.

Korea Selatan merupakan contoh negara berkembang di Asia yang dalam waktu relatif singkat berhasil menjadi negara maju. Sebagaimana tergambar pada Gambar 2, jarak pendapatan per kapita antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 1970an-1980an tidak terlalu jauh. Bahkan dengan Malaysia, pendapatan perkapita Korea Selatan pada periode tersebut relatif sama. Selanjutnya, data pada Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan pengeluaran R&D Korea Selatan. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perhatian Negara dan Swasta Korea Selatan terhadap R&D sangat besar. Pada tahun 1976 anggaran R&D Korea Selatan sudah mencapai 0.44 % dari PDB, tahun 1985 meningkat menjadi 1.59 % dari PDB, dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 3.74 % dari PDB. Pengeluaran Korea Selatan

⁵Headrick, D., 1996. Botany, chemistry, and tropical development. *Journal of World History* 7, No. 1 (Spring 1996): 1-20.

⁶ Pakpahan, A. "Strategi dan Kebijakan Anti-Guremisasi untuk Membalik Arus Berlanjutnya Transformasi Ekonomi yang Merugikan Petani dan Pertanian", Orasi Profesor Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor, 13 Nipember 2013.

Tabel 5. Pengeluaran R&D Korea Selatan 1963-2010

untuk R&D pada tahun 2018 sudah mencapai 4.52 % dari PDB. Pengalaman Korea Selatan dan Malaysia menunjukkan bahwa R&D merupakan salah satu kunci kemajuan penting.

R&D Expenditure/GDP				
<i>Year</i>	<i>R&D expenditure (billion won)</i>	<i>Public sector R&D expenditure/GDP (%)</i>	<i>Private sector R&D expenditure/GDP (%)</i>	<i>R&D expenditure/ GDP (per cent)</i>
1963	1.2	NA	NA	NA
1970	10.5	NA	NA	NA
1976	60.9	NA	NA	0.44
1980	211.7	0.30	0.28	0.58
1985	1,155.2	0.31	1.28	1.59
1990	3,349.9	0.36	1.51	1.87
1995	9,440.6	0.47	2.03	2.50
2000	13,848.5	0.66	1.73	2.39
2005	24,155.4	0.68	2.11	2.79
2010	43,854.9	0.94	2.80	3.74

Source: Ministry of Education, Science and Technology (MEST), various issues.
Note: NA = not available.

Science, Technology & Society 18:2 (2013): 165–188

Tabel 6. Investasi Korea Selatan dalam R&D (% dari PDB), 2011-2018.

2011	3.59
2012	3.85
2013	3.95
2014	4.08
2015	3.98
2016	3.99
2017	4.29
2018	4.52

Sumber: <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm>, diunduh 4 Mei 2020, 7:50 pa.

Tentu banyak faktor yang akan menentukan keberhasilan dalam pembangunan. Namun demikian, di antara banyak faktor tersebut R&D merupakan faktor utama. R&D inilah yang menjadi transformator yang menghasilkan ECI meningkat. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa ECI Korea Selatan menempati urutan ke-6 dunia. Investasi dalam R&D merupakan bukti empiris bahwa R&D merupakan ikhtiar manusia untuk menembus faktor ketidaktahuan. Untuk menembus faktor ketidaktahuan ini diperlukan investasi dan patriotisme serta ketekunan yang luar biasa. Data berikut ini menunjukkan betapa cepatnya Korea Selatan melakukan transformasi ekonomi.

Tabel 7. Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia & Korea Selatan (1957 & 2002)

Uraian	Indonesia		Malaysia		Thailand		Korea Selatan	
	1957	2002	1957	2002	1957	2002	1957	2002
GDP Pertanian (%)	56	17	45	9	38	9	41	4
Tenaga Kerja Pertanian (%)	61	44	58	21*	82	50*	70	12

Catatan: * = tenaga kerja pria

Sumber: 1) Data tahun 1957 diperoleh dari Russett et. al., 1964. World Handbook of Political and Social Indicators. Yale University Press, New Haven.

2) Data tahun 2002: a) BPS untuk Indonesia; b) 2004 World Development Indicators.

Tabel 8. Perubahan Persentase Penurunan Tenaga Kerja (TK) Pertanian dan GDP Pertanian, dan Elastisitas Perubahan TK Pertanian terhadap Perubahan GDP Pertanian, Tahun 1957&2002

Uraian	Indonesia	Thailand	Malaysia	Korea Selatan
Δ % TK Pertanian (A)	17	32	37	58
Δ % GDP Pertanian (B)	39	29	36	37
A/B	0.43	1.1	1.02	1.56

Sumber: Pakpahan, 2004⁷.

Pada tahun 1957, tenaga kerja pertanian di Korea Selatan masih sekitar 70 %, di Thailand masih sekitar 82 %, dan di Malaysia masih sekitar 58 % dari total tenaga kerja pertanian. Sedangkan di Indonesia, tenaga kerja pertanian pada tahun 1957 masih sekitar 61 % dari total tenaga kerja nasional. Pada tahun 1957, pangsa PDB pertanian dalam PDB nasional di Korea Selatan masih 41 %, Malaysia 45 %, Thailand 38 % dan Indonesia masih sekitar 56 %. Dengan demikian, pada periode tersebut seluruh negara tersebut masih berstatus

⁷ A. Pakpahan, "Industrialisasi yang menyakiti petani", Suara Pembaruan 17/11/04.

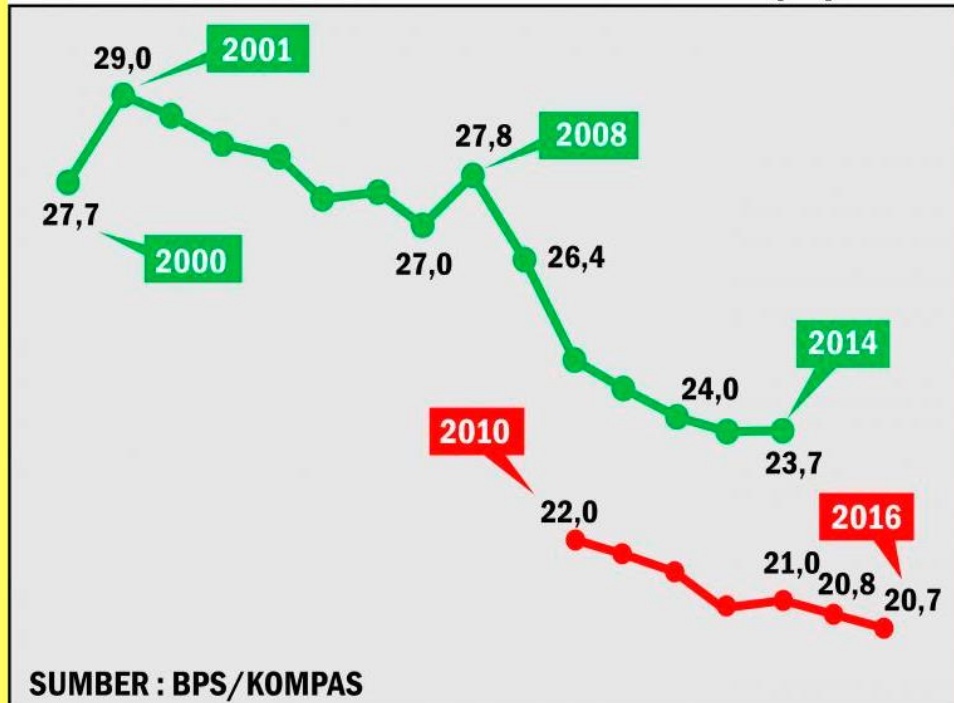
sebagai negara agraris yaitu negara di mana pertanian sebagai pendapatan utama sebagian besar penduduknya.

Pada tahun 2002 tenaga kerja pertanian di Korea Selatan tinggal 12 % dan pangsa PDB pertanian dalam PDB nasional sudah menurun jauh, yaitu tinggal 4 %. Pangsa PDP pertanian di Malaysia, Thailand dan Indonesia pada tahun 2002 masing-masing menjadi 9%, 9 % dan 17 %. Dengan komposisi seperti itu dapat dihitung secara kasar elastisitas perubahan pangsa tenaga kerja pertanian per setiap 1.0 % perubahan pangsa PDB pertanian dalam PDB Nasional. Hasilnya disajikan pada Tabel 8. Angka pada baris terakhir menunjukkan bahwa setiap 1 % penurunan pangsa PDB pertanian dalam PDB nasional Korea Selatan diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian dalam tenaga kerja nasional sebesar 1.56 %. Artinya, sektor industri dan jasa Korea Selatan tumbuh sangat cepat dan pertumbuhannya itu juga pro penyerapan tenaga kerja dengan tingkat penyerapan sekitar 1.56 % per penurunan nilai PDB pertanian dalam PDB nasional sebesar 1.0%. Di Malaysia dan Thailand pun hasilnya relatif sama yaitu transformasi ekonomi yang bersifat pro tenaga kerja. Sedangkan transformasi ekonomi Indonesia menyisakan beban bagi pertanian mengingat setiap penurunan pangsa nilai PDB pertanian dalam PDB nasional 1% hanya diikuti oleh penurunan tenaga kerja pertanian sebesar 0.43%. Artinya, transformasi ekonomi Indonesia tidak memberikan manfaat bagi pertanian. Dampaknya sangat nyata yaitu luas lahan usahatani di Indonesia semakin menggurem (mengecil) mengingat pertambahan angkatan kerja banyak tertinggal di lingkungan pertanian; sedangkan di Korea Selatan dan apalagi di negara-negara maju lainnya luas lahan per petani semakin meluas.⁸

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan sederhana yang hasilnya disajikan pada Tabel 8 itu dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode 1957-2002 transformasi ekonomi Indonesia jauh lebih lambat dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan apalagi bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Permasalahan Indonesia bertambah berat mengingat sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi malahan pada periode berikutnya mengalami kelesuan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

⁸ Sebagai gambaran umum: rata-rata luas lahan usahatani per rumah tangga petani (RTP) di Korea Selatan walaupun masih dalam skala kecil, yaitu rata-rata 1,4 ha pada 2005, telah meningkat 50 % lebih luas daripada situasi pada 1970. Luas lahan rata-rata RTP di Jepang, yaitu di Hokkaido meningkat dari 4,09 ha pada 1965 menjadi 16,45 ha pada 2005. Adapun di Amerika Serikat dari tahun 1880 ke tahun 1997 luas lahan per RTP telah meningkat 4 kali lipat; di Kanada meningkat lebih dari 7 kali lipat dalam periode 1871-2006, dan peningkatan rata-rata luas lahan usahatani per RTP juga terjadi di Brazil, Peru, Denmark, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Australia. Lihat Pakpahan, A., 2013. Arah, Strategi, dan Program Anti-guremisasi petani dan Pertanian. Orasi Profesor (Riset), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

PERAN MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%)



Gambar 3. Peran Manufaktur terhadap PDB Nasional 2000-2016

Pada tahun 2000 sektor manufaktur memberikan kontribusi 27,7 % terhadap PDB Indonesia dan pada 2001 kontribusinya meningkat menjadi 29,0 %. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2014 kontribusi sektor manufaktur turun menjadi 23,7 % dan pada tahun 2016 kontribusi sektor manufaktur kembali menurun menjadi 20,7 % dari PDB nasional. Perkembangan seperti ini tentunya bertentangan dengan harapan dan juga berbahaya bagi perkembangan masa depan mengingat Indonesia berada dalam proses involusi ekonomi yaitu mengecilnya peran industri manufaktur dalam perekonomian nasional. Proses ini akan menciptakan dampak berantai baik ke arah hulu maupun ke arah hilir. Ke arah hulu dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan hidup dan degradasi sumberdaya alam mengingat ketergantungan yang semakin tinggi akan sumberdaya alam. Hal tersebut menjadi semakin parah mengingat cara untuk mendapatkannya bersifat eksploitatif yang memberikan dampak yang akan merusak lingkungan. Proses ini dapat dilihat sebagai perangkap sosial-budaya yang memerlukan pendekatan pembangunan yang bersifat khusus. Model pembangunan yang dimaksud adalah model pembangunan sebagai pemerdekaan sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian berikut.

IV. PEMBANGUNAN SEBAGAI PEMERDEKAAN

Pada bagian terdahulu telah disinggung maksud dari terminologi pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada bagian ini konsep pembangunan sebagai kemerdekaan akan diuraikan secara lebih lengkap.

A. Makna Kemerdekaan

Telah diketahui bersama bahwa bagi Indonesia makna dari kemerdekaan digambarkan oleh perjalanan sejarah panjang rakyat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya dari beragam bentuk dan jenis penjajahan. Pernyataan kemerdekaan secara politis diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta mewakili rakyat dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Apa pembelajaran paling nyata dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini? Pembelajaran paling penting adalah kemerdekaan itu merupakan manifestasi spiritual, yaitu pembebasan spiritual dari anti-kemerdekaan, yaitu penjajahan. Manifestasi spiritual dari kemerdekaan dapat dibaca sebagai sumberdaya spiritual yang menjadi sumberdaya kehidupan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Rakyat, bangsa dan negara yang penuh dengan spirit kemerdekaan dapat diibaratkan sebagai rakyat dan bangsa yang seluruh pikiran dan perbuatannya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara saja. Inilah **energi rakyat dan bangsa Indonesia** sebagai pahlawan yang telah melahirkan Indonesia merdeka.

Penulis mencoba mencari teladan hasil pembangunan yang mengakar pada spirit kemerdekaan tersebut dan membuat Indonesia menjadi negara besar baik dalam ukuran politik internal maupun dalam skala geografis global. Proses kemerdekaan tersebut ditempuh dengan terlebih dahulu membangun konsepsi pemikiran dan kemudian berbagai proses kemerdekaan berlangsung. Konsep tersebut akhirnya menjadi output yang diterima oleh masyarakat dunia dan kemudian menjadi konsensus global. Penelusuran ini menemukan kesuksesan Indonesia dalam mewujudkan dirinya sebagai NKRI berstruktur geografis sebagai Benua Maritim dengan kesepakatan masyarakat dunia yang dituangkan dalam UNCLOS 1982 (*United Nations Convention for the Law of the Sea*).

Perlu diingat bahwa UNCLOS 1982 ini tidak datang secara tiba-tiba. UNCLOS 1982 dimulai pada masa PM Ali Sastroamidjojo, yang kemudian diumumkan oleh PM Djuanda pada 13 Desember 1957 yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran kaum intelektual dan perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan Pemerintah. Dalam hubungannya dengan Benua Maritim, PM Djuanda menugaskan Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari landasan hukum yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar Prakarsa Indonesia. Mr. Mochtar Kusumaatmadja merumuskan konsep "Asas Archipelago" sebagai konsep negara kepulauan (*archipelagic state*). Buah dari konsep ini dapat dipanen setelah berjalan selama kurang-lebih 25 tahun. Dengan dasar UNCLOS 1982 ini luas wilayah Indonesia menjadi 7.81 juta km² dengan rincian: luas daratan 2.01 juta km², luas laut 3.25 juta km² dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut 2.55 juta km².⁹ Proses yang berjalan dalam kasus ini menunjukkan fenomena yang jelas sekali menggambarkan sebagai proses kemerdekaan mengingat hasilnya

⁹<http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

mengatasi: 1) keterpisahan pulau-pulau mengingat dalam hukum laut sebelumnya Indonesia bukanlah sebagai suatu wilayah geografis yang utuh; 2) ekspansi wilayah laut ZEE sebesar 2.55 juta km² yang mana pertambahan luas ZEE ini lebih luas dari luas daratan Indonesia itu sendiri; dan 3) pertambahan luas laut antar-pulau yang sebelumnya merupakan perairan internasional. Fenomena ini merupakan kesuksesan besar Indonesia dalam kancah pembangunan politik-hukum global dan memiliki potensi sangat besar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Teladan kedua sebagai contoh pembangunan sebagai kemerdekaan adalah kebijakan moneter yang ditempuh oleh Jepang pada tahun 1999. Krisis ekonomi Asia membuat Jepang mengambil kebijakan bidang moneter yang selain tidak umum juga bersifat sangat radikal: menetapkan bunga bank 0% atau bahkan negatif¹⁰.

Apa makna radikal dari kebijakan ini? *Pertama*, dalam mata ajaran ilmu ekonomi dikenal bahwa kapital merupakan barang langka dan diinginkan (*preferred*). Kelangkaan dan keinginan (preferensi) ini melahirkan cara pandang bahwa uang Rp 1000 hari ini lebih tinggi nilainya daripada uang Rp 1000 pada tahun yang akan datang. Kenyataan tersebut sudah menjadi budaya berpikir dunia sejak lama. Dengan dasar pemikiran tersebut maka lahirlah konsep bunga (*interest*) sebagai faktor diskonto nilai kapital tahun yang akan datang dengan nilai kapital hari ini. Bunga ini merupakan kompensasi plus keuntungan bagi pemilik uang (modal) untuk menyimpan uangnya di bank, yang dibayar oleh para peminjam yang berlaku sebagai investor. Artinya, semakin tinggi bunga bank, maka semakin besar pembobotnya sehingga investasi menjadi kemungkinan tidak feasible. Sebaliknya, semakin rendah bunga bank maka semakin kecil pembagi untuk nilai masa depan, dengan demikian investasi menjadi semakin feasible. Kata investasi menjadi penting mengingat masa depan yang lebih baik hanya bisa diwujudkan melalui investasi yang tepat dan layak. Dengan bunga 0 %, ditambah lagi bangsa Jepang hanya berhutang kepada rakyatnya sendiri, maka investasi menjadi mungkin dilaksanakan dan risiko dipikul oleh seluruh rakyat. Sejak 1999, bank di Jepang lebih berperan sebagai lembaga pelayanan investor dan bank mendapatkan pendapatannya dari pembayaran jasanya tersebut, bukan lewat bunga yang dibayar oleh peminjam (investor). *Kedua*, bangsa Jepang mengambil sikap bahwa hanya orang yang bekerja yang boleh mendapatkan pendapatan. Bunga adalah pendapatan bukan hasil dari bekerja. Jenis pendapatan semacam ini digolongkan sebagai rente (*rent = unearned income*). Dari sudut pandang kemerdekaan bangsa Jepang melaksanakan spirit mementingkan kepentingan Bangsa dan Negeranya, dan para pemilik uang (orang kaya) Jepang tidak mempermasalahkan kebijakan yang telah berjalan 20 tahun di Negeri Sakura ini. Bahkan negara-negara lain di Eropa seperti Denmark dan Swiss, antara lain, sekarang ini sudah mengikuti kebijakan Jepang tersebut¹¹.

Apa yang dikerjakan oleh Djuanda dan Jepang dalam teladan di atas adalah mengirimkan pesan bahwa pembangunan itu memerlukan sifat dan sikap patriotisme kenegaraan. Masyarakat Jepang yang sekarang dikenal sebagai masyarakat pekerja keras, pada masa lalunya mendapatkan citra dari bangsa Barat sebagai bangsa pemalas¹². Perubahan dari pemalas menjadi pekerja keras memerlukan patriotisme kenegaraan yang tinggi. Pada tahun 1999,

¹⁰<https://www.barrons.com/articles/japan-dropped-interest-rates-to-zero-20-years-ago-theyre-still-there-51549994899>

¹¹<https://tradingeconomics.com/country-list/interest-rate>

¹² HA-JOON CHANG, Bad Samaritan. Bloomsbury Press 2007

bangsa Jepang kembali melahirkan ideologi di bidang moneter yang bukan hanya merugikan mereka yang pada masa sebelumnya dapat memperoleh kekayaan melalui manipulasi di bidang moneter atau bunga bank, tetapi juga orang-orang kaya Jepang bertindak dan berperilaku sebagai samurai-samurai nasionalisme yang menyelamatkan bangsa Jepang. Ideologi ini sekarang sudah berkembang dan diterima juga oleh negara-negara lain yang menerapkan bunga nol atau bahkan juga negatif.

Pada masyarakat tradisional spirit kemerdekaan itu sangat tampak pada petani. Petani biasanya tidak terlalu memperhitungkan untung-rugi atas usahanya yang sudah melembaga atau membudaya. Dalam bahasa Inggris nama pertanian adalah *agriculture*; ada kata *culture*. Dapat dibayangkan petani menanam pohon karet yang baru bisa disadap setelah mencapai usia paling cepat 5 tahun. Ini adalah investasi dengan masa tunggu yang sangat lama. Dalam melakukan usahanya itu petani dipandang tidak *bankable* pihak perbankan. Padahal faktanya mereka melakukan investasi yang mana outputnya, dalam kasus karet sebagai contoh ekstrim, tidak ada yang mereka nikmati sendiri. Dunia industri ban memerlukan karet alam sekitar 70-80 % dari total bahan yang digunakan untuk membuat ban. Artinya terdapat hubungan langsung antara perkebunan karet petani dengan industri ban. Tetapi tetap saja walaupun petani telah melakukan investasi dengan modal mereka sendiri dan memikul risiko sendiri, dunia di atasnya tidak membela kepentingannya. Kasus petani karet ini hampir berlaku di seluruh elemen atau kegiatan pertanian yang dikerjakan oleh para petani yang biasa dinamakan sebagai pertanian rakyat. Kasus ini merupakan teladan atas kasus pembangunan tanpa spirit kemerdekaan.

B. Perangkap Sosial (*Social Trap*)

Sering tidak disadari bahwa kita itu sebenarnya sedang berada dalam suatu perangkap sosial (*Social Trap*)¹³. Mengapa dengan titik awal yang relatif sama antara Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan, ternyata Korea Selatan jauh lebih cepat mencapai kemajuan, bahkan sudah mencapai status sebagai negara maju sejak 1996? Mengapa walaupun dasar teori ekonomi yang dipakai sebagai alat analisis sama untuk semua negara yang menggunakan pasar sebagai institusi utama tetapi pada kenyataannya tidak banyak yang mengalami kemajuan seperti Korea Selatan atau Malaysia. Untuk lebih bisa merasakan ketertinggalan Indonesia dari Malaysia data berikut dapat dijadikan input ke dalam pikiran kita.

Nilai total ekspor Malaysia pada tahun 2018 mencapai US\$ 247,324 juta¹⁴. Total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai US\$ 180,215 juta¹⁵. Selisih nilai ekspor Malaysia dengan Indonesia ternyata mencapai US\$ 67.1 milyar lebih besar dari total nilai ekspor Indonesia. Faktor utama penyebab rendahnya nilai ekspor Indonesia adalah rendahnya pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam perekonomian Indonesia sebagaimana tergambar dalam indek ECI yang disajikan pada bagian terdahulu.

Ketergantungan akan sumberdaya alam merupakan perangkap penting yang membuat Indonesia tertinggal. Perangkap lainnya yang juga perlu diperhatikan untuk melihat bahwa kita itu ada dalam suatu perangkap adalah fakta menunjukkan bahwa tidak ada satu negara

¹³Platt, J. (1973). Social traps. *American Psychologist*, 28(8), 641–651. <https://doi.org/10.1037/h0035723>

¹⁴ <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/MYS/textview>.

¹⁵ <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/MYS/textview>

pun yang berada di wilayah iklim tropika bisa menjadi negara maju setelah kurang-lebih 75 tahun mengisi kemerdekaannya. Apakah kondisi tersebut disebabkan oleh iklim tropika? Kalau data yang dipakai adalah data pasca eksplorasi bangsa-bangsa Eropa (1400-an). Mungkin jawabannya adalah *ya*. Tetapi apabila menggunakan data lebih tua lagi, misalnya tahun 800-an, maka kita menemukan bahwa pada masa itu Indonesia sudah memiliki Candi Borobudur, kerajinan keris, dan peta pelayaran laut yang melebihi kekayaan intelektual bangsa Eropa pada masa itu. Artinya, penyebab ketertinggalan kita bukanlah iklim walaupun iklim tropika ini bersifat panas, lembab dan basah yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Penyebab ketertinggalan kita adalah berada dalam budaya atau institusi. Apa kiranya yang menjadi perangkat sosial utama yang membuat ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang pesat?

Perangkat budaya yang berhubungan langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan serta hambatan-hambatan dalam membangun masyarakat industri atau industrialisasi adalah fenomena keberlanjutan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah ditanam di tanah air oleh Belanda sejak 1870. Kalau Belanda memberlakukan HGU di Hindia Belanda, maka kebijakan tersebut adalah tepat mengingat manfaat dari perkebunan tersebut untuk negeri Belanda. Hindia Belanda dijadikan tempat atau fasilitas Belanda untuk “mencetak uang” termasuk dengan memanfaatkan modal melalui hutang (Lihat Tabel 1).

Apa ide di balik HGU sehingga HGU bisa dikategorikan sebagai *social trap*? *Pertama*, istilah HGU itu sendiri mengandung pemaknaan yang bersifat *agnogenesis*¹⁶ yaitu merupakan proses pengaburan sebuah makna (*anti-kejelasan*). Dalam istilah HGU digunakan kata **guna** tetapi kata ini tidak sesuai dengan makna **guna**, melainkan berlaku sebagai kepemilikan (*ownership*) untuk periode 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi.

Jelas sekali bahwa kata **guna** berbeda dengan kata **milik**. Mengapa bisa dikatakan **milik**? HGU bisa dikatakan **milik perusahaan** pemilik HGU mengingat lahan tersebut status kepemilikannya berpindah dari sebelumnya sebagai aset negara kemudian berubah menjadi aset perusahaan. Dengan statusnya sebagai aset perusahaan maka lahan dengan status HGU tersebut dapat menjadi sumberdaya (aset) untuk menarik masuk dana publik yang berada di dunia perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Proses ini dimungkinkan mengingat HGU sebagai aset milik perusahaan dapat berfungsi sebagai kolateral bagi perusahaan dalam meminjam modal kepada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Lebih jauh lagi, HGU itu juga dapat dijual. Biaya untuk memperoleh lahan berstatus HGU juga relatif murah yaitu sebesar nilai BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang nilainya hanya 5 % dikalikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Nilai NJOP ini dapat dipastikan sangat kecil mengingat lokasinya biasanya berada di daerah pedalaman. Untuk perusahaan milik Negara seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) persoalan hak atas tanah HGU tersebut masih berada dalam ranah Pemerintah. Namun untuk lahan-lahan HGU yang berada sebagai aset perusahaan swasta situasinya menjadi sangat berbeda. *Kedua*, dalam legalitas HGU juga terdapat fakta yang berbias dari hukum kelangkaan lahan sebagaimana yang diajarkan dalam teori ekonomi, yaitu tidak dikenal istilah *land rent*. Dengan perkataan lain nilai *land rent* tidak dikenal dalam sistem akuntansi perusahaan berbasis lahan HGU. Dalam konsep *land resources* dimana *land* adalah sumberdaya yang selain langka juga *fixed*, *land rent* merupakan konsep

¹⁶ Proctor, Robert N., and Londa Schiebinger. 2008. *Agnology: The making and unmaking of ignorance*. Stanford, CA: Stanford University Press.

sentral ilmu ekonomi sumberdaya lahan¹⁷. Arti *fixed* adalah berapa pun harga tanah *supply* lahan tidak akan berubah. *Supply* lahan secara total adalah konstan. Perangkap kedua ini menjauhkan Indonesia dari makna ilmu ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya misalokasi atau distribusi sumberdaya lahan. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan ideologi bunga nol persen seperti yang dijalankan di Jepang, ideologi HGU juga menunjukkan bahwa 100 % *land rent* yang mana di dalamnya terdapat fungsi sosial dan ekologi, diberikan Negara kepada korporasi. Dalam kasus ini, ideologi ekonomi Indonesia bertolak belakang dengan ideologi ekonomi Jepang.

Kalau HGU ini dinamakan sebagai ideologi alokasi sumberdaya lahan, maka ideologi ini merupakan ideologi yang melandasi transfer sumberdaya alam dari Negara kepada korporasi. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah *opportunistic behavior*, yaitu perilaku manipulatif yang bisa merugikan negara. *Opportunistic behavior* bisa terjadi di kedua belah pihak. Konteks ini menjelaskan mengapa industri hilir atau industrialisasi perkebunan tidak berkembang di Indonesia. Mengapa demikian?

Apabila konsep HGU ini diperdalam lagi menurut alur pikir falsafah alokasi sumberdaya lahan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan naungan Pembukaan-nya, maka kebijakan HGU dapat dikatakan sebagai proses misalokasi lahan yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak berlandaskan akan ilmu pengetahuan seperti ilmu ekonomi sumberdaya alam. Menurut kacamata ini, "ideologi HGU" merupakan ideologi yang membangun budaya feodalisme baru (*neo-feodalism*) yaitu budaya yang menjadikan rente sebagai sumber dari kekayaan. Oleh karena itu, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit lebih dari 14 juta hektar dengan sekitar 7 juta hektare atau lebih dimiliki perusahaan besar swasta (domestik dan asing), sekitar 1 juta hektare dimiliki BUMN dan sisanya milik para petani kelapa sawit, industri hilir yang maju berbasis kelapa sawit akan sulit lahir dan berkembang di Indonesia selama perangkap sosial di atas masih menjadi perangkap yang menghalangi kemajuan.

Model pemanfaatan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Hutan Tanaman Industri pada dasarnya mirip model HGU di atas. Perbedaan fundamentalnya pada model HPH atau HTI, kawasan hutannya tetap masih dimiliki Negara atau masih tergolong sebagai aset Negara. Karena itu lahan hutan bukan sebagai aset perusahaan. Persoalannya adalah hadirnya *opportunistic behavior* dari korporasi akan mendahulukan kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang seperti kelestarian hutan. Karena itu, membangun industri hilir berbasis kehutanan yang memerlukan visi jangka panjang akan jarang atau bahkan tidak berkembang. Data menunjukkan bahwa era keemasan eksploitasi hutan alam tidak mampu berjalan lama akibat pohon-pohonnya sudah lebih awal habis dieksploitasi. Dampak lebih lanjut dari model pemanfaatan sumberdaya alam seperti itu adalah terjadinya kerusakan habitat dan selanjutnya akan terjadi kerusakan alam yang makin menyeluruh. Akibatnya, keberlanjutan atau kelestarian hanya akan tersisa dalam cerita kenangan masa lalu. Model kehancuran habitat akibat kesalahan umat manusia dalam mengelolanya sudah dibuktikan, antara lain, oleh Lowder Milk dalam bukunya "*Conquest of the land through 7,000 years*".¹⁸

¹⁷ Lihat, antara lain, Barlowe, Raleigh. *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*, 4th ed. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1986, x + 559 pp.

¹⁸ W.C. Lowdermilk, 1975. *Conquest of the land through 7,000 years*. United States. Soil Conservation Service, Washington, D.C. : U.S. Dept. of Agriculture, Soil Conservation Service.

C. Koreksi Fundamental

Penerapan konsep pembangunan sebagai pemerdekaan selalu mencari faktor penyebab utama terjadinya suatu ketidak-merdekaan atau berlanjutnya kehidupan ibarat berada dalam suatu perangkat sosial. Untuk lebih memperjelas hal yang dimaksud berikut ini disampaikan contoh konsep pembangunan sebagai pemerdekaan model Abraham Lincoln.

Model Abraham Lincoln. Model pembangunan Amerika Serikat pada masa Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Ke-16 Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai model pembangunan sebagai pemerdekaan. Kebijakan pemerdekaan Amerika Serikat model Abraham Lincoln adalah paket: pemerdekaan AS dari sistem diskriminasi rasial, yaitu pemerdekaan dari sistem perbudakan. Bersamaan dengan hal tersebut adalah pendirian Kementrian Pertanian AS (USDA), pelembagaan *Homestead Act 1862*, dan pelembagaan *Morrill Act 1862*.

Penulis melihat model ini sebagai model agrarian reform yang lengkap yang diwariskan oleh Abraham Lincoln. Ide utamanya adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah maju apabila perbudakan berlanjut. Perbudakan selain merupakan penghinaan atas perikemanusiaan juga merupakan hambatan besar untuk berlangsungnya kemajuan sumberdaya manusia yang sangat diperlukan untuk melahirkan proses industrialisasi yang berkelanjutan. Pendirian Kementrian Pertanian sangat diperlukan untuk memajukan pertanian. Kemajuan dalam bidang pertanian merupakan landasan bagi keberlanjutan revolusi industri. Kementrian pertanian juga merupakan organ Pemerintah AS dalam menjalankan kebijaksanaannya. Kebijakan Pemerintah AS tidak akan efektif apabila petaninya miskin. Landasan modal pertanian adalah lahan usahatani. Dengan *Homestead Act 1862* negara mengalokasikan lahan per parcel sekitar 65 hektare. Lahan ini menjadi milik petani. Selanjutnya, Lincoln memandang bahwa tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks daripada pertanian. Proses produksi pangan dan komoditas lainnya dilakukan di alam terbuka. Untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, mulai dari ilmu tentang matahari, angin dan awan; logistik dan pasar, serta tentu saja ilmu tentang tanah, mikroorganisme, tanaman dan benih, serta ilmu-ilmu lainnya. Dengan dilembagakannya *Morrill Act 1862* sebagai landasan membangun *Landgrant Universities* di setiap negara bagian AS, maka lahir dan berkembang pesat universitas-universitas besar di AS sebagai bagian dari kebijakan Lincoln tersebut. University of Wisconsin, Michigan State University dan Iowa State University adalah beberapa contoh universitas yang lahir dari gagasan pemerdekaan Abraham Lincoln.

Koreksi fundamental apa yang kiranya akan bisa dan kuat membalik arus dan gelombang perkembangan kemajuan Indonesia mendatang?

Dari perjalanan sejarah perkembangan bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari Indonesia seperti Korea Selatan, Jepang atau Malaysia sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian terdahulu, tampaknya tidak ada jalan lain kecuali harus sukses dalam menciptakan industrialisasi. Industrialisasi hanya akan bisa lahir dan berkembang apabila masyarakatnya merupakan masyarakat industrial yang *industrious*. Tidak mungkin masyarakat industrial dan *industrious* akan lahir apabila budaya korporasi yang berkembang adalah budaya dengan rancang bangun paham neo-feodalisme yang mendapatkan kekayaan dari rente sumberdaya lahan. Untuk membangun masyarakat industrial dan *industrious* yang sangat diperlukan adalah

lahir dan berkembangnya lembaga-lembaga yang tepat dan memiliki kapabilitas membangun sumberdaya manusia dan kelembagaan komplemennya. Hanya dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi sebagaimana telah diperlihatkan oleh negara-negara lain yang sudah lebih maju yang telah melaksanakannya.

Kehadiran budaya neo-feodalisme tidak kompatibel dengan persyaratan lahir dan berkembangnya sistem kelembagaan yang akan melahirkan dan mempromosikan lahir dan berkembangnya sumberdaya manusia dan kelembagaan yang berkualitas. Karena itu sisi budaya neo-feodalisme ini juga perlu diselesaikan. Cara penyelesaian yang paling sederhana adalah menerapkan prinsip ekonomi sumberdaya lahan yaitu lahan sebagai barang langka, tidak bisa dibuat oleh manusia, dan sifat *supply-nya fixed*. Karena itu sudah pasti hadir nilai yang disebut *land rent*. Selain sisi ekonomi, *land rent* ini juga menunjukkan lahan itu memiliki fungsi sosial dan lingkungan. Karena itu, Negara harus mengambilnya dan mendistribusikan kembali kepada rakyat. Selanjutnya, makna HGU harus diluruskan sesuai dengan maknanya sebagai “guna”, bukan milik. Parameter *land rent* dikenakan untuk jasa penggunaan dalam jangka panjang tersebut. Aset lahan kalau mau dimasukkan ke dalam aset perusahaan harus dinyatakan bahwa itu merupakan aset Negara yang dipinjamkan. Dengan demikian menjadi jelas, lahan HGU bukan tergolong sebagai aset milik perusahaan yang mendapatkan HGU tersebut.

Model atau pemikiran yang disampaikan di atas hanyalah suatu kasus atau model. Model ini bisa dijadikan bahan pemikiran untuk mengembangkan model pemerdekaan Indonesia dari kemiskinan, ketertinggalan dan kerusakan lingkungan. Pada intinya, *opportunistic behavior* tidak dapat diatasi oleh perangkat hukum yang tidak berjiwa pemerdekaan. Insentif/disinsentif ekonomi diperlukan tetapi di atas segalanya harus terlahir para pahlawan-pahlawan atau patriot pembangunan. Para pahlawan pembangunan ini, kalau mencontoh Jepang, adalah kalangan elite, *influencers*, serta para pemimpin negara dan juga pemimpin korporasi, yang mendahulukan kepentingan Negara dan kepentingan masa depan dari seluruh rakyatnya, sebagaimana tergambar dalam penerapan kebijakan bunga bank nol persen atau bahkan nilai bunga bank negatif.

V. PENUTUP

Tulisan ini diawali oleh penyajian gambaran ekonomi Hindia Belanda dalam periode 1870-1939 dan gambaran ekonomi Indonesia dalam periode 1971-2000. Indikator ekonomi yang digunakan adalah indikator Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of International Payments, BOP*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut adalah bahwa perekonomian Indonesia berkembang secara skala tetapi tidak banyak berubah secara esensi atau struktur. Sumber pendapatan devisa Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor bahan baku atau bahan mentah sehingga nilai ECI Indonesia masih bertanda negatif jauh di bawah ECI Korea Selatan atau di bawah ECI Malaysia. Dapat dilihat pula bahwa penarikan hutang luar negeri atau masuknya modal asing tidak banyak berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia. Akibatnya, sebagaimana terlihat dari kasus krisis ekonomi 1997, hutang luar negeri menyebabkan krisis parah ekonomi nasional. Situasi 10 tahun terakhir juga tampak bahwa transaksi berjalan memburuk dan ini diimbangi oleh meningkatnya arus modal asing yang besar. Masuknya modal asing, memiliki konsekuensi mengalir dengan deras

devisa keluar sebagaimana diperlihatkan oleh Keseimbangan Neraca Pembayaran Jasa yang selalu defisit dimana faktor pembuat defisit terbesar ini adalah mengalirnya devisa keluar dalam bentuk dividen atau profit. Dalam kelompok transaksi jasa global ini yang mendapatkan surplus hanyalah sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan travels (Tourism). Dalam periode terakhir juga tampak telah terjadi deindustrialisasi.

Kelemahan perekonomian Indonesia mengakar pada paham atau paradigma pembangunan itu sendiri. Kebijakan pembangunan lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat materiil. Padahal berdirinya Indonesia itu sendiri merupakan produk dari energi spiritual yang tinggi untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Paham ini tidak berlanjut walaupun sudah ada teladan keberhasilan yaitu dicapainya Indonesia sebagai Benua Maritim dengan tambahan areal laut yang sangat luas, termasuk areal ZEE. Bahkan sebaliknya dalam pemanfaatan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan untuk perkebunan, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) prinsip ekonomi tentang kelangkaan tidak digunakan dan prinsip fungsi sosial lahan dilaksanakan secara terbalik, yaitu pemberian seluruh *land rent* kepada korporasi. Dipandang dari aspek filosofis kebijakan di balik HGU tersebut melahirkan budaya feodalisme baru (*neo-feodalism*). Budaya *neo-feodalisme* ini bertentangan dengan iklim sosial-budaya yang diperlukan untuk lahirnya budaya industrial yang industrious. Hal ini menjelaskan selain ketimpangan kepemilikan lahan menjadi sangat tinggi, involusi pertanian yang membuat petani semakin menggurem terjadi, juga terjadi involusi perekonomian nasional karena sektor industri melemah. Kerusakan lingkungan hidup tidak terlepas dari faktor-faktor di atas. Di atas semuanya pembangunan nasional perlu menjadikan bahwa pembangunan sebagai pemerdekaan.

1000 GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA MERUSAK LINGKUNGAN



INFORMASI #1000GAGASANEKONOMI SELENGKAPNYA

bit.ly/1000Gagasan

SAMPAIKAN GAGASANMU KE

1000gagasan@madaniberkembangan.id

SYARAT DAN KETENTUAN

bit.ly/Kontribusi1000gagasan